



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Pidato Pengukuhan Guru Besar

Media Sosial: Penyubur atau Pengubur Demokrasi?

Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

Guru Besar Bidang Ilmu Sistem Informasi
Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia

30 Mei 2022/29 Syawal 1443

Pidato Pengukuhan Guru Besar

Media Sosial: Penyubur atau Pengubur Demokrasi?

Fathul Wahid

Guru Besar Bidang Ilmu Sistem Informasi
Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia

29 Syawal 1443/30 Mei 2022

Daftar isi

1	Pendahuluan.....	2
2	Media Sosial sebagai Penyubur Demokrasi.....	4
2.1	Kisah Filipina	4
2.2	Kisah Mesir.....	6
2.3	Kisah Indonesia	8
3	Media Sosial sebagai Pengubur Demokrasi.....	12
3.1	Kisah Amerika Serikat.....	12
3.2	Kisah Filipina	14
3.3	Kisah Indonesia	15
4	Memahami Fenomena.....	17
4.1	Karakteristik media sosial.....	17
4.2	Dialektika media sosial	18
4.3	Media sosial dan demokrasi.....	22
5	Memitigasi dan Mencari Solusi	24
5.1	Konteks Indonesia	24
5.2	Beberapa usulan	25
6	Ucapan Terima Kasih.....	30
7	Referensi.....	33

Media Sosial: Penyubur atau Pengubur Demokrasi?

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Yang terhormat

1. Ketua Pembina, Ketua Pengawas, dan Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dan semua jajaran;
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua dan anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia;
4. Ketua dan anggota Senat Universitas Islam Indonesia
5. Para Rektor Universitas Islam Indonesia periode terdahulu;
6. Para pemimpin perguruan tinggi sahabat, baik yang tergabung di Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia (BKSPTIS) maupun Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi);
7. Para kolega Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Sekretaris Eksekutif, Kepada Badan, Direktur di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
8. Para pemimpin lembaga mitra dan sahabat Universitas Islam Indonesia;
9. Para dosen, dan terkhusus, kolega di Jurusan Informatika, Universitas Islam Indonesia, tempat para teman pengembaraan akademik saya sejak 25 tahun yang lalu;
10. Keluarga tercinta: ibu dan bapak, istri, anak-anak, serta saudara-saudara;
11. Kawan-kawan media; dan
12. Para undangan dan hadirin yang mengikuti acara ini baik di ruangan ini, maupun yang melalui kanal daring.

Hanya kepada Allah Yang Maha Memuliakan, segala puji kita kirimkan, dan setinggi syukur kita panjatkan. Rezeki yang kita nikmati, semuanya karena izin Yang Maha Suci. Tak terkecuali, amanah jabatan profesor yang dibebankan, juga karena Allah Yang Maha Melapangkan berkenan.

Selawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad saw. Sang Kekasih Allah yang mencerahkan dunia dengan risalah dan mengajak manusia ke kebaikan tanpa lelah. Bagi kita, Rasulullah merupakan uswah, untuk istikamah sebagai muslim ramah yang siap menjadi umat penengah.

1 Pendahuluan

Topik pidato singkat ini adalah media sosial dan demokrasi. Sebelum banyak yang bertanya dalam hati, izinkan saya menjelaskan secara ringkas hubungan topik ini dengan bidang yang saya tekuni.

Isu demokrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (eDemocracy) masuk ke dalam kajian disiplin sistem informasi, bidang yang saya tekuni. Disiplin ini merupakan hasil perkawinan beragam disiplin seperti ilmu komputer, arsitektur, psikologi kognitif, ekonomika, rekayasa, dan lain-lain (Baskerville & Myers, 2002).

eDemocracy merupakan ranah khusus dari penggunaan TIK di pemerintahan (eGovernment). eGovernment merupakan sebuah disiplin yang menggabungkan beragam sumber, termasuk sistem informasi, ilmu komputer, sosiologi, administrasi publik, ilmu politik, hukum, dan lain-lain (Scholl, 2007). Bahkan, eDemocracy sudah melahirkan "anak baru" yang bernama eParticipation (Sæbø, Rose, & Flak, 2008).

Jika disiplin sistem informasi diibaratkan sebagai induk, maka ia sudah beranak bernama eGovernment, bercucu eDemocracy, dan bercicit eParticipation.

eGovernment sudah berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang diterima dengan baik, karena di antaranya sudah mempunyai definisi formal, komunitas peneliti di banyak belahan dunia, sekelompok masalah penelitian yang unik, basis pengetahuan umum, jurnal dan konferensi yang mapan, program pascasarjana di banyak tempat, prosedur penelitian yang diterima komunitas, dan interaksi yang kuat antara disiplin akademik dan bidang praktik (Scholl, 2007).

Durasi waktu yang terbatas, tentu tidak memungkinkan kita untuk mendiskusikan beragam isu secara utuh. Tetapi, paling tidak dalam pidato ini beberapa isu penting dapat diungkap, sebagai pemantik diskusi lanjutan.

Tujuannya sederhana, yaitu untuk memahami fenomena secara lebih baik dan untuk mengedukasi publik supaya dapat secara sadar menjadi pemikir mandiri, mampu memanen manfaat dari media sosial, dan sekaligus menghindari dampak buruknya. Secara lebih khusus, dalam konteks ini, media sosial dihubungkan dengan demokrasi: apakah sebagai penyubur atau sebaliknya, pengubur demokrasi.

Demokrasi merupakan konsep yang kompleks. Baragam predikat disematkan kepadanya. Gagnon (2008) mengidentifikasi 2.234 deksripsi demokrasi yang disebut dalam literatur. Di sana, misalnya, terdapat demokrasi liberal, *illiberal*, keterwakilan (*representative*), cepat (*fast*),

lambat (*slow*), besar (*big*), kecil (*small*), putih (*white*), hitam (*black*), hijau (*green*), pelangi (*rainbow*), feminin (*feminine*), maskulin (*masculine*), *torpedo-boat*, dan sekitar dua ribuan predikat lainnya (Gagnon, 2018; Gagnon & Fleuss, 2020). Pidato kali ini, tidak akan mendiskusikan kompleksitas konsep ini secara lebih jauh, dan itu di luar wilayah disiplin sistem informasi.

Dalam konteks ini, demokrasi didefinisikan secara umum sebagai bentuk tata kelola pemerintah yang menempatkan rakyat atau warga negara sebagai komponen penting. Di dalamnya ada praktik-praktik demokrasi yang "ditegakkan dan direproduksi melalui aksi sosial" (Warren, 2017, h. 43). Pengambilan keputusan dan kebijakan negara tidak bersifat elitis, tetapi mempertimbangkan dengan serius suara warga negara.

2 Media Sosial sebagai Penyubur Demokrasi

Izinkan saya mengawali pidato dengan beberapa kisah. Kisah pertama terjadi di Filipina pada 2001, 21 tahun lampau, sedangkan kisah kedua terjadi di Mesir satu dekade kemudian, pada 2011. Selanjutnya, beberapa kisah ringkas dari Indonesia juga disajikan.

2.1 Kisah Filipina

Inilah kisah pertamanya.

Pada 16 Januari 2001, Kongres Filipina menggelar sidang pelengseran Presiden Joseph Estrada. Sang Presiden diduga melakukan korupsi bernilai miliaran. Para pendukungnya menentang pembukaan amplop yang berisi

bukti kepemilikan akun bank senilai PHP3,3 miliar (setara sekitar Rp900 miliar, dengan kurs saat ini), yang melawan Sang Presiden (Macapagal & Nario-Galace, 2003).

Keputusan Kongres tidak seperti yang publik harapkan. Menjelang tengah malam pada pukul 23.00 pada hari tersebut, beberapa jam sejak keputusan dibuat, ribuan massa memenuhi Epifanio de los Santos Avenue, di Manila.

Mobilisasi publik sebagian didukung dengan layanan pesan singkat (SMS) "Go 2 EDSA. Wear blk". (Pergi ke Epifanio de los Santos Avenue. Kenakan pakaian hitam.) (Shirky, 2011).

Beberapa hari kemudian, jutaan massa berkumpul dan mematikan lalu-lintas di Manila (Gambar 1). Pada saat itu, hampir tujuh juta pesan pendek tersebut tersirkulasi.



Gambar 1. Suasana demonstrasi menuntut Presiden Joseph Estrada untuk mundur

Kongres akhirnya berubah pikiran dan mengizinkan bukti dalam amplop tersegel untuk diperlihatkan. Nasib Sang Presiden akhirnya diputuskan pada 20 Januari 2001. Dia dilengserkan (Shirky, 2011).

Melalui persidangan yang memakan waktu lebih dari enam tahun, pada 12 September 2007, Sang Mantan Presiden dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan (*The Guardian*, 2007).

Pelengseran Joseph Estrada menjadi kisah pertama di muka bumi, bagaimana media sosial dapat memobilisasi massa dengan begitu cepatnya.

2.2 Kisah Mesir

Berikut kisah yang kedua.

Pada 6 Juni 2010, Khaled Said, seorang blogger diseret keluar warung Internet (warnet) dan dipukuli oleh polisi sampai menjemput ajalnya. Kisah miris ini terjadi di Aleksandria, Mesir. Pemilik warnet, Hassan Mosbah, dalam wawancara yang divideokan, menjelaskan dengan detail kronologi pembunuhan tersebut. Video tersebut pun diunggah di Internet (Khondker, 2011).

Kondisi sosial politik Mesir di bawah Presiden Husni Mubarak yang sudah berkuasa selama hampir 30 tahun, memang tidak sedang baik-baik saja. Protes terhadap pemerintah secara terbuka dapat dirunut balik sejak awal 2003, ketika terjadi demonstrasi selama 12 jam di Lapangan Tahrir (Lim, 2012).

Singkat kisah, setelah banyak fragmen menengangkan, enam bulan kemudian, pada awal 2011, Wael Ghonim, Direktur Pemasaran Google Timur Tengah dan Afrika

Utara, membuat Halaman Facebook (*Facebook Page*), "We are All Khaled Said" (Khondker, 2011). Dalam mengelola halaman Ghonim memakai nama samaran El-Shaheed atau Sang Martir.

Halaman ini menarik sekitar 350.000 anggota sebelum 14 Januari 2011, ketika diktator di Tunisia, Presiden Zine al-Abidine Ben Ali, digulingkan (Giglio, 2011).

Ghonim mengundang anggota Halaman Facebook untuk melakukan demonstrasi pada 25 Januari 2011. Sebanyak 50.000 merespons akan bergabung. Ribuan publik Mesir ikut berdemonstrasi di Lapangan Tahrir.

Dia yang merupakan Admin 1 Halaman Facebook tersebut, merasa diikuti, dan mengontak kawannya yang menjadi Admin 2. Polisi akhirnya mencokok dan menahan Ghonim. Saat itu, tak seorang pun tahu kondisinya. Ghonim, si Admin 1, hilang. Dia berpesan kepada Admin 2 untuk menjaga Halaman Facebook "We are All Khaled Said" tetap hidup. Peserta demonstrasi yang menentang pemerintahan saat itu pun semakin banyak.

Pada 11 Februari 2011, Presiden Husni Mubarak mengundurkan diri setelah demonstrasi 18 hari di Lapangan Tahrir, yang diikuti oleh lebih dari satu juta orang (Gambar 2).

Ghonim yang ditahan dengan mata tertutup, akhirnya dilepaskan dua pekan kemudian (Giglio, 2011). Dia pun dianggap sebagai sosok penting di balik revolusi di Mesir, yang menggerakkan massa melalui media sosial, meskipun dia sendiri mengatakan bahwa yang terjadi adalah gerakan tanpa pemimpin (*leaderless movement*) (Giglio, 2011).



Gambar 2. Suasana Lapangan Tahrir pada Februari 2011

Ini adalah kisah tentang bagaimana media sosial bisa memberikan dampak yang luar biasa dalam memobilisasi massa yang mempunyai kesamaan pandangan.

2.3 Kisah Indonesia

Kisah dari konteks Indonesia, juga bisa kita hadirkan. Salah satunya adalah kasus Cicak dengan Buaya, yang melibatkan ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pada April 2009, pembicaraan Susno Duadji terekam dalam penyadapan KPK ketika menyelidiki kasus korupsi. Dalam sebuah wawancara di media pada Juli 2009, Susno mengekspresikan kemarahannya, menyebut ketegangan antara KPK dan Polri, dengan cicak melawan buaya. Cicak diatribusikan ke KPK, sedang buaya menyimbolkan Polri. Istilah ini menyulut reaksi keras dari publik (Lim, 2015).

Dua orang komisioner KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto diberhentikan sementara. Segera setelah kasus cicak melawan buaya muncul di media massa, terutama televisi, pada Juli 2009, muncul grup Gerakan 1.000.000 Facebooker Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto. Sebulan kemudian, pada Agustus 2009, anggota grup tersebut sudah melampaui target. Selain itu, beberapa grup lain dengan niat serupa juga bermunculan di Facebook.

Dua bulan kemudian, pada September 2009, mereka berdua ditangkap dengan tuduhan pemerasan dan penyuapan. Mereka menolak tuduhan tersebut dan merasa dijebak untuk melemahkan KPK.



Gambar 3. Demonstrasi mendukung KPK.

Dukungan dengan beragam bentuk, seperti kartun, komik, poster, dan lagu, juga bermunculan di kanal daring, terutama media sosial, termasuk Youtube. Ketika Indonesian Corruption Watch (ICW) mengundang

demonstrasi di Jakarta melalui media sosial, sebanyak 5.000 Facebooker bergabung untuk mendukung KPK (Gambar 3).

Demonstrasi serupa juga, kemudian, terselenggara di banyak kota. Akhirnya, pada 3 Desember 2009, tekanan publik membuat tuduhan terhadap Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto dicabut.

Di sektor publik, selain mendukung gerakan sosial, media sosial juga digunakan untuk kanal partisipasi publik untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan publik oleh pemerintah.

Kota Bandung, ketika dipimpin oleh Walikota Ridwan Kamil, dapat menjadi salah satu contoh yang baik dalam pemanfaatan media sosial. Sang Walikota berujar, "Saya sadar, ketika terpilih menjadi walikota, media sosial merupakan bagian tak terpisahkan untuk tetap dekat dengan rakyat".

Pada saat itu, di Kota Bandung, media sosial telah menjadi pendukung komunikasi dan koordinasi antaraktor, termasuk dengan warga. Deklarasi penggunaan media sosial secara terbuka juga membutuhkan kesiapan dan keberanian, terutama dari sisi mental. Dalam sebuah kesempatan, Ridwan Kamil mengatakan, "Dalam menghadapi cuit yang berisi kritik, ejekan, dan intimidasi, kesabaran saya sudah sampai level dewa" (dalam Wahid & Sæbø, 2015).

Di Kota Bandung, penggunaan media sosial terbukti telah mendorong partisipasi publik, menaikkan transparansi, menjadikan pemerintah lebih responsif, menambah

kapasitas institusional pemerintah, memperbaiki moral kerja, dan meningkatkan kualitas layanan publik (Wahid & Sæbø, 2015).

Di level nasional, aplikasi LAPOR! (lapor.go.id) sebagai portal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat bisa menjadi contoh lain. Aplikasi ini, saat ini, dikawal oleh Kantor Staf Presiden, Ombudsman, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga menghadirkan dampak baik.

Pada Mei 2022, LAPOR! sudah digunakan oleh 658 lembaga pemerintah, mulai kementerian, pemerintah provinsi, sampai dengan pemerintah kabupaten/kota. Beragam kemungkinan tindakan (*affordance*) bisa difasilitasi oleh aplikasi ini. Termasuk di antaranya adalah minimalisasi laporan yang salah tujuan, integrasi beragam kanal, fasilitasi prioritas masalah, transparansi kinerja institusional, dan percepatan inisiatif partisipasi (Dini, Sæbo & Wahid, 2018).

Secara umum, di sektor publik, media sosial bisa menghadirkan beragam manfaat yang terkait dengan peningkatan partisipasi publik, perbaikan transparansi dan akuntabilitas, serta koproduksi beragam ide dan kebijakan bersama warga (Wahid, 2017). Adopsi media sosial di sektor pemerintahan juga semakin marak dari waktu ke waktu (*e.g.*, Luoma-aho & Canel, 2020).

Rangkaian kisah di atas memberikan harapan segar bahwa media sosial dapat menjadi penyubur demokrasi, ketika suara warga negara mendapatkan kanal atau digunakan

sebagai basis pengambilan kebijakan, termasuk dalam memberikan layanan publik yang lebih bermartabat.

3 Media Sosial sebagai Pengubur Demokrasi

Beberapa kisah di atas belum mewakili hubungan media sosial dan demokrasi secara utuh.

Tren penggunaan media sosial untuk manipulasi opini publik ini terjadi di hampir seluruh negara di muka bumi. Riset yang dilakukan oleh tim dari Universitas Oxford (Bradshaw, Bailey, & Howard, 2021; Bradshaw & Howard, 2019) menemukan bahwa kampanye dengan manipulasi media sosial pada 2020 terjadi di 81 negara. Angka ini meningkat dari 70 negara pada 2019, 48 pada 2018, dan 28 pada 2017.

Bahkan, pada 2020, ditemukan aktivitas pasukan siber di 70 negara. Proses ini tidak hanya melibatkan pengguna manusia, tetapi juga akun terautomatisasi atau *political bots* untuk mengamplifikasi pesan dengan cepat. Studi menemukannya di 57 negara, termasuk Indonesia (Bradshaw, Bailey, & Howard, 2021).

Beragam potret buram pun perlu dihadirkan. Berikut beberapa di antaranya.

3.1 Kisah Amerika Serikat

Majalah bergengsi *Foreign Affairs* edisi penghujung 2021, menurunkan sebuah artikel yang berjudul "*Liars in High Places*". Artikel mereviu sebuah buku berjudul *Liars: Falsehoods and Free Speech in an Age of Deception*, karya

Sunstein (2021). Buku tersebut mendiskusikan fenomena di Amerika Serikat (AS), yang dalam posisi kritis terkait dengan maraknya peredaran informasi palsu dan kebohongan.

Informasi palsu atau kebohongan dapat memalingkan orang dari masalah yang seharusnya, mengambil risiko yang tidak perlu, membahayakan kesehatan, dan merusak manajemen diri. Informasi yang tidak akurat juga dapat menjadikan orang mempunyai kesimpulan yang salah: orang baik yang dianggap melakukan tindakan sangat buruk dan sebaliknya (Sunstein, 2021). Di masa pandemi Covid-19 misalnya, kebohongan yang menyebar bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan publik.

Keterpilihan Donald Trump pada 2016 sebagai Presiden Amerika Serikat dianggap oleh banyak peneliti tidak lepas dari isu kebohongan dan kapalsuan (*e.g.*, Sunstein, 2021; Heawood, 2018).

Dalam pemilu di AS, juga ditemukan adanya keterlibatan perusahaan Cambridge Analytica yang membantu kampanye calon presiden, dengan menambang data dari Facebook. Data dari sebanyak 200.000 pengguna Facebook digunakan untuk membuat profil psikologis rinci terhadap 87 juta pengguna (Heawood, 2018).

Data ini kemudian digunakan untuk *microtargeting* kampanye. Terdapat beragam bahaya praktik ini, termasuk mengeksploitasi data personal, menutup karakteristik informasi yang sebetulnya iklan politik, informasi yang diterima secara privat tidak mudah dikoreksi, informasi yang diterima secara privat mungkin tidak benar, dan memungkinkan partai politik membuat janji politik yang berbeda-beda (Heawood, 2018).

Penyalahgunaan data ini diungkap oleh mantan pegawai Cambridge Analytica dalam sebuah wawancara, mengungkap skandal yang melibatkan Facebook. Facebook melalui CEO Mark Zuckerberg meminta maaf ketika dimintai keterangan oleh Kongres AS. Pada Juli 2019, Facebook didenda USD5 miliar karena pelanggaran privasi (Wong, 2019). Facebook juga membayar denda GBP500.000 kepada pemerintah Inggris, karena membuka data penggunaannya yang berpotensi risiko serius (BBC, 2019).

3.2 Kisah Filipina

Berikut adalah kisah yang masih hangat.

Di awal Mei 2022, pemilihan presiden Filipina yang dimenangkan oleh Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. juga menyingkakan kisah suram serupa. Bongbong merupakan anak dari Ferdinand Marcos yang menjadi presiden di Filipina sejak 1965, yang terpilih kembali beberapa kali, dan menempati posisi sampai 1986, ketika dipaksa turun dari jabatannya dan melarikan diri.

Sejak 1972, di belasan tahun terakhir pemerintahannya, dia menjelma menjadi diktator. Ribuan orang terbunuh dan banyak yang jasadnya dibuang di pinggir jalan untuk menebarkan ketakutan.

Istri Ferdinand Marcos, Imelda, terkenal dengan gaya hidupnya yang sangat mewah, di tengah kemiskinan rakyat di Filipina. Termasuk yang diindikasikan dengan kepemilikan properti di luar negeri serta koleksi barang mewah lainnya. Ketika melarikan diri, ribuan pasang sepatu ditemukan di istana presiden. Pasangan ini diduga menggelapkan dana negara sebesar USD10 miliar (Westfall, 2022).

Kisah suram inilah yang ingin disamarkan oleh keluarga dan pendukungnya dengan upaya rehabilitasi nama baik sejak kematian Ferdinand Marcos pada 1989. Media sosial menjadi salah satu kanal untuk ini.

Banyak analisis politik beredar bahwa kemenangan Bongbong tidak terlepas dari peran media sosial dalam menyebarkan informasi palsu yang dilakukan oleh para pendukungnya. Informasi tersebut menyerang pesaingnya, Leni Robredo, dan menyebar melalui banyak kanal media sosial, terutama Facebook, TikTok, dan Youtube (Elemia, 2022; Westfall, 2022).

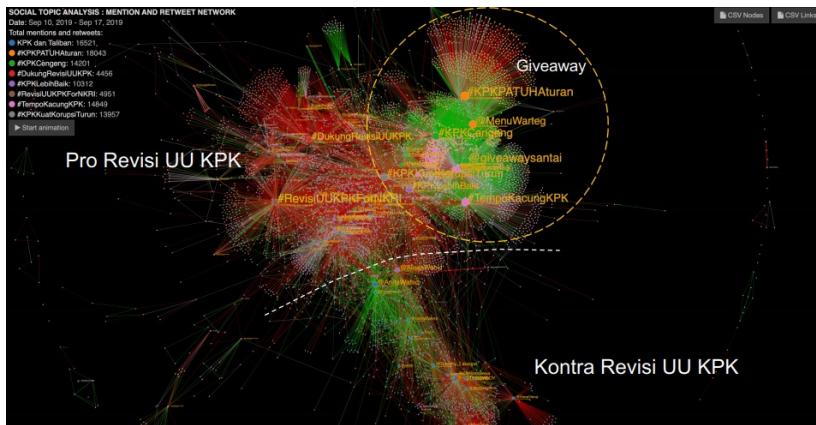
3.3 Kisah Indonesia

Kasus penggunaan media sosial untuk penggiringan opini juga terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, media sosial telah secara masif digunakan untuk kampanye politik di Indonesia untuk mengamankan kekuasaan melalui pemilihan umum yang kompetitif (Saraswati, 2016). Pemantauan percakapan di media sosial menegaskan hal ini dan memberikan gambaran yang lebih detail (Sastramihardja *et al.*, 2021; Sastramidjaja & Wijayanto, 2022).

Kita juga bisa mengambil kasus yang lebih mutakhir ketika pasukan siber terlibat dalam pembentukan opini publik ketika proses revisi UU KPK (Gambar 4) atau UU Cipta Kerja dilakukan, untuk mendukung salah satu pihak (Sastramihardja *et al.*, 2021; Sastramidjaja, 2021). Studi lebih komprehensif yang mendiskusikan beberapa kasus di Indonesia pun membimbing kepada kesimpulan yang menegaskan (Sastramidjaja & Wijayanto, 2022).

Banyak fakta lain yang bisa dihadirkan untuk membuktikan adanya penggunaan media sosial untuk

tujuan manipulatif di Indonesia. Termasuk di antaranya adalah pertarungan antarkubu ketika memberikan dukungan atau menyikapi suatu isu nasional. Ujaran kebencian dan upaya membungkam kelompok yang berbeda opini dapat dengan mudah ditemukan (e.g., Lim, 2017).



Gambar 4. Analisis jaringan sosial kubu pendukung dan penolak revisi UU KPK (Sumber: Drone Emprit)

Masalah menjadi semakin akut ketika sebagian para pegiat media sosial yang disering disebut dengan pendengung (*buzzer*) ini pun didanai oleh uang negara (Julaika, 2020; Sastramidjaja, 2021). Tentu, diskusi panjang dapat dibuka untuk kasus ini.

Negara asingpun dapat ikut "nimbrung" dalam proses politik atau pemilihan umum (pemilu) sebuah negara (Chertoff & Rasmussen, 2019; Heawood, 2018). Selain pemilihan presiden AS pada 2016, pemilihan presiden Prancis 2017, pemilu Italia pada Maret 2018, referendum di Macedonia pada September 2018, pemilu Swedia pada

September 2018, dan pemilu Bosnia dan Herzegovina pada Oktober 2018, diduga kuat diwarnai dengan campur tangan asing melalui penyampaian informasi tertentu, terutama informasi palsu atau hoaks, dengan upaya terstruktur. Meskipun, sebagaimana dilaporkan oleh *Foreign Affairs* (Chertoff & Rasmussen, 2019), negara-negara tersebut menyangkal adanya campur tangan asing.

Beberapa kisah suram di atas menunjukkan bahwa media sosial dapat menampilkan sisi jahatnya sebagai pengubur demokrasi, ketika opini dimanipulasi untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu, dan mengabaikan kemaslahatan bersama.

Lantas, bagaimana memahami kedua sisi media sosial yang diametral ini?

4 Memahami Fenomena

Mari, kita mulai dengan memahami karakteristik media sosial.

4.1 Karakteristik media sosial

Meskipun, sangat mungkin nilai (*values*) tertentu dijadikan dasar dan disuntikkan ketika sebuah platform didesain dan dibuat, tetapi dalam perjalanannya, banyak nilai baru yang muncul (*emergent*), dan mendasari penggunaan lain (Sein *et al.*, 2011). Penggunaan ini bahkan mungkin tidak terbayangkan di awal kemunculannya.

Hal inilah yang akhirnya memunculkan kejutan-kejutan atau konsekuensi yang tidak direncanakan (*unintended consequences*), baik yang membawa ke arah positif maupun negatif¹. Media sosial pun demikian.

Salah satu nilai-nilai baru terkait dengan media sosial, adalah yang terkait dengan kontrol pengguna untuk memprediksi dan mengarahkan perilaku (Zuboff, 2019). Beragam algoritme dengan bantuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dikembangkan untuk mendukungnya.

Sebagai sebuah artefak sosial, media sosial mengandung beberapa konstruk yang saling terkait. Di dalam terdapat identitas (*identity*, yang salah satunya terkait dengan dramaturgi), kehadiran (*presence*, ilusi persepsi tanpa perantara), hubungan (*relationship*, kekuatan ikatan), percakapan (*conversation*, kecepatan percakapan), kelompok (*groups*, identitas sosial), reputasi (*reputations*, aksi komunikatif dan kepercayaan), dan berbagi (*sharing*, motivasi intrinsik dan ekstrinsik) (Kietzmann *et al.*, 2012).

Setiap platform media sosial mempunyai kekuatan di konstruk tertentu. Sebagai contoh, Youtube mempunyai kekuatan di konstruk berbagi, sedang Facebook di hubungan. Tentu saja, ada gradasi kekuatan pada konstruk yang lain (Kietzmann *et al.*, 2012).

4.2 Dialektika media sosial

Lebih lanjut, perspektif dialektika (Soh *et al.*, 2003; Robey & Boudreau, 1999) dapat digunakan untuk memahami

¹ Lihat misalnya Taleb (2005) untuk mendapatkan perspektif baru dalam memandang beragam kejutan yang hadir karena kehadiran sebuah inovasi.

beberapa kisah kontras yang dipaparkan di atas. Dalam penggunaannya, media sosial tidak lepas dari sisi positif dan negatifnya.

Dalam konteks demokrasi, media sosial, di satu sisi, memberikan harapan untuk membebaskan warga negara dari rezim otoriter, seperti yang diilustrasikan beberapa kisah di atas. Tetapi, di sisi lain, media sosial dapat juga digunakan untuk melakukan represi atau memanipulasi opini publik, dan bahkan membangun kediktatoran (Guriev & Treisman, 2022).

Kini, media sosial telah menghubungkan miliaran manusia di muka bumi. Karenanya, informasi dapat menyebar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika yang menyebar adalah informasi menginspirasi, maka semakin banyak orang yang akan teredukasi.

Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan apa yang dikhawatirkan oleh Zuboff (2019) sebagai "kapitalisme pengawasan" (*surveillance capitalism*) yang memanfaatkan konektivitas manusia untuk manfaat maksimum dengan harga mahal: kebebasan manusia.

Dalam konteks perhelatan politik, kebebasan direnggut dengan manipulasi dan penggiringan opini, sehingga akal sehat menjadi sulit untuk berfungsi. Atau, dengan perspektif lain, ketika opini dan perasaan dimainkan, dan fakta tidak menjadi yang utama.

Davies (2018) menyebut fenomena ini sebagai "demokrasi perasaan" (*democracy of feelings*), ketika perasaan semakin mendominasi keputusan manusia. Fakta dimanipulasi untuk memberikan dampak emosional yang maksimum, dan perasaan menjadi cara menavigasi perubahan lingkungan yang cepat.

Dalam konteks ini, menurut Davies (2018), tantangan terbesarnya bukan penghormatan kepada kebenaran, tetapi kebenaran sudah menjadi isu politik, yang digunakan untuk memperuncing konflik dan bukan sebaliknya.

Algoritme tertentu dikembangkan untuk mengolah data penggunaan media sosial. Dengan algoritme ini, opini publik dimanipulasi dan perilakunya dimodifikasi. Beragam pendekatan algoritme dapat dilakukan. Termasuk di antaranya dengan penyetelan (*tuning*) alir perilaku pada waktu dan lokasi yang tepat, penggiringan (*herding*) yang melibatkan konteks terdekat pengguna media sosial untuk direspons, atau pengkondisian (*conditioning*) pengguna secara massal untuk melakukan tindakan tertentu (Zuboff, 2019).

Algoritme inilah yang mendukung kemunculan kamar gema (*echo chamber*), ketika pengguna media sosial cenderung terpapar informasi yang sesuai dengan preferensi dan perilaku daring lampaunya. Inilah yang menjadikan ruang keterbelahan antarkelompok yang berbeda pendapat menjadi semakin lebar.

Karenanya, paparan terhadap perspektif lain, akhirnya, sangat jarang terjadi, sehingga terbentuk eksposur selektif (*selective exposure*) dan bias konfirmasi (*confirmation bias*) (Lazer *et al.*, 2017). Propaganda komputasional (*computational propaganda*) memperburuk situasi ini. Propaganda komputasional merupakan "sekumpulan platform media sosial, agen otonom, dan mahaduta yang ditugaskan untuk memanipulasi opini publik" (Howard & Woolley, 2016; hal. 5).

Propoganda ini akan menyebabkan hanya informasi yang sesuai dengan perilaku lampau pengguna, termasuk informasi yang diakses dan dibagi, yang akan muncul di layarnya, sedangkan informasi dengan perspektif lain ditapis.

Inilah yang menjadikan seleksi informasi berkualitas tinggi semakin menantang. Meski seseorang ingin menyebar informasi berkualitas tinggi, tetapi kemelimpahan informasi telah menyebabkan kemiskinan atensi (Shapiro *et al.*, 1998), sehingga menyaring kualitas informasi menjadi tidak mudah. Karenanya, tak jarang informasi dengan kualitas rendah pun bisa menjadi viral sebagaimana informasi dengan kualitas tinggi (Lazer *et al.*, 2017).

Temuan di konteks Indonesia juga memberikan gambaran serupa. Pola penggunaan media sosial oleh politisi dapat menjadi indikasi.

Studi terhadap politisi Indonesia menemukan empat strategi penggunaan media sosial (Dini & Wahid, 2017). Keempat strategi tersebut adalah (1) *nominal*, ketika penetrasi Internet dan media sosial di lokasi konsitituen sangat rendah; (2) *instrumental*, ketika media sosial digunakan sebagai wasilah berkomunikasi dengan warga tetapi dengan bantuan administrator; (3) *manipulatif*, ketika media sosial digunakan untuk membangun citra baik dan sekaligus terlihat kapabel; dan (4) *tulen*, ketika politisi secara mandiri mengelola akun media sosialnya tanpa perantara untuk berinteraksi dengan warga dan sesama politisi.

Politisi pengguna sosial media secara manipulatif tidak jarang memainkan perasaan publik, untuk mendapatkan atensi dan keterlibatan (*engagement*). Mereka juga menyewa para pesohor dengan cacah pengikut banyak untuk membantu. Sebuah cuit sepanjang 140 huruf, misalnya, ketika musim pemilihan presiden bahkan bisa berharga Rp100 juta².

Data yang dikumpulkan oleh *The Economist* (The Data Team, 2016) untuk kancah global memberikan gambaran yang mencengangkan. Sebagai contoh, dukungan (*endorsement*) oleh pesohor dengan pengikut satu juta orang, per konten dapat berharga USD25.000 (sekitar Rp362,3 juta) di Youtube, USD12.500 (Rp181,1 juta) di Facebook, USD10.000 (Rp144,9 juta) di Instagram, dan USD4.000 (Rp57,9 juta) di Twitter. Tarif ini meningkat drastis dengan bertambah jumlah pengikut. Sebuah konten dukungan di Youtube dengan pengikut di atas 7 juta orang bisa berharga USD300.000 (Rp4,3 miliar).

4.3 Media sosial dan demokrasi

Sebagian studi (*e.g.*, Jha & Kodila-Tedika, 2020) menemukan bahwa ada hubungan yang erat antara penetrasi media sosial dan pertumbuhan demokrasi. Tetapi di sisi lain, penggunaan media sosial justru memberikan dampak yang sebaliknya, membajak dan menguburkan demokrasi (Sunstein, 2021; Guriev & Treisman, 2022).

Terdapat beberapa penjelasan yang bisa diberikan di sini untuk memahami dialektika yang terjadi.

² Berdasar wawancara penulis dengan ahli strategi media sosial yang terlibat dalam kampanye calon presiden, pada awal 2016.

Pertama, media sosial memberikan corong kepada publik yang sebelumnya tereksklusi dari diskusi politik pada media tradisional (Tucker *et al.*, 2017). Meskipun media sosial hanya menjadi salah satu faktor gerakan sosial, di samping faktor sosial dan politik lain, tetapi tetap memegang peranan penting, terutama ketika media konvensional (*i.e.*, media elektronik dan cetak) dan masyarakat sipil tidak terbuka dan bersuara (Khondker, 2011).

Kedua, meskipun media sosial membuka akses yang luas terhadap beragam informasi, tetapi dia sendiri sebagai platform tidak secara inheren demokratis atau tidak. Media sosial merupakan kakas yang dapat digunakan oleh aktor politik untuk berbagai tujuan, termasuk yang membentuk keotoriteran (Tucker *et al.*, 2017; Guriev & Treisman, 2022).

Jika rezim otoriter yang terbentuk, maka masa depan demokrasi akan terancam (Levitsky & Ziblatt, 2018). Konsepsi keotoriteran, dalam konteks ini, perlu diperluas. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa keotoriteran tidak lagi dilakukan dengan menebar ketakutan dengan kekuatan militer, tetapi melalui pemutarbalikan informasi dan fakta (Levitsky & Ziblatt, 2018; Guriev & Treisman, 2022).

Guriev dan Treisman (2022) menyebut aktor dibalik keotoriteran varian baru sebagai autokrat informasi (*informational autocrat*) atau diktator pemutarbalik fakta (*spin dictator*). Mereka adalah para pencabut ruh demokrasi yang sejati, meski label demokrasi tetap dipakai karena mereka berpura-pura bersikap demokratis (Guriev & Treisman, 2022).

Lebih lanjut, para diktator varian ini bahkan dicintai dan tidak ditakuti karena mereka populer dan menggunakan untuk mengkonsolidasi kekuasaan. Mereka juga menghindari represi kekerasan secara terbuka (Guriev & Treisman, 2022). Banyak kepala negara yang dimasukkan ke dalam kelompok ini. Negara yang disebut, termasuk Singapura, Malaysia, Venezuela, Rusia, Turki, Hungaria, dan Peru (Guriev & Treisman, 2022).

Dalam konteks ini, Levitsky dan Ziblatt (2018; h. 10) mengatakan bahwa "kerusakan demokrasi tidak disebabkan oleh para jenderal dan pasukan, tetapi oleh pemerintah yang terpilih. ... Kemunduran demokrasi hari ini dimulai dari bilik pemungutan suara".

5 Memitigasi dan Mencari Solusi

Kita tentu berharap, skenario suram seperti ilustrasi di atas, tidak terjadi di negara kita tercinta, Indonesia. Atas dasar itu, mitigasi dan solusi perlu dilakukan secara kolektif.

5.1 Konteks Indonesia

Mari, pencarian solusi kita mulai dengan memahami konteks Indonesia. Di sini, kita perlu mencatat bahwa membawa garis demarkasi geografis seperti ini, saat ini, sudah berkurang validitasnya, karena aktivitas daring sudah menembus batas fisik geografis yang digambar secara imajiner di atas peta.

Namun demikian, untuk memberikan ilustrasi terukur, fakta berikut perlu disampaikan karena sebagian orang menganggap ada keterpisahan antara dunia maya dan nyata. Hiruk-pikuk di dunia maya merupakan cerminan

dunia nyata. Keduanya saling mempengaruhi. Aktivitas di dua dunia tersebut dapat saling melewati batas imajinernya.

Media sosial, dalam beragam bentuknya, telah menyedot perhatian pengguna Internet dalam satu dekade terakhir, meskipun sebetulnya sudah muncul sejak akhir 1990an. Pada Januari 2022, pengguna media sosial global mencapai 4,62 miliar atau setara dengan 58,4% populasi bumi, atau 74,8% jika dibatasi hanya untuk yang berumur 13 tahun ke atas. Sebanyak 424 juta (atau penambahan 10,1%) merupakan pengguna yang baru bergabung dalam setahun terakhir.

Pengguna Internet yang bukan merupakan pengguna media sosial adalah kelompok minoritas, hanya 6,6%. Penggunaan media sosial pun sangat intensif. Setiap hari waktu yang digunakan untuk mengaksesnya adalah 2 jam 27 menit (DataReportal, 2022a).

Di Indonesia sendiri, pada Januari 2022, dari 277,7 juta penduduk, 204,7 juta (73,7%) di antaranya merupakan pengguna Internet. Sebanyak 191,4 juta menggunakan media sosial. Angka ini setara dengan 68,9% dari populasi atau 93,5% dari pengguna Internet. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa angka ini tidak selalu mewakili individu unik (DataReportal, 2022b).

5.2 Beberapa usulan

Penetrasi media sosial yang luar biasa tersebut, seharusnya semakin menyadarkan kita untuk tidak mengabaikan fakta sosial yang sangat penting ini. Sekali lagi, fenomena di dunia maya ini tersambung dengan dunia nyata.

Beberapa usulan di bawah ini dapat memantik elaborasi dan diskusi lanjutan. Tentu saja, ini merupakan daftar pendek dan tidak komprehensif.

Pertama, setiap teknologi, termasuk media sosial, tidak lahir di ruang hampa. Di sana, selalu ada nilai-nilai yang disuntikkan ketika mendesain. Dia tidak bebas nilai (*value free*), tetapi sebaliknya penuh dengan nilai (*value laden*).

Nilai-nilai ini seharusnya bukan yang melawan nilai-nilai abadi, seperti kejujuran, keadilan, dan kesetaraan. Intervensi ketika tahap ini sangat menantang, kecuali para desainer, pengembang, dan perusahaan media sosial secara intrinsik meyakini nilai-nilai tersebut, dan menjadikan basis dalam menjalankan bisnis. Pengembangan algoritme yang dapat mendeteksi informasi palsu dan kebohongan dapat membantu menapis penyebarannya secara lebih luas.

Penambangan data pengguna tanpa persetujuan dan propaganda komputasional, misalnya, secara etis, sangat mungkin melanggar nilai-nilai ini. Aktivitas ini sangat erat dengan para saintis data. Karenanya, para pendidikannya, termasuk perguruan tinggi, perlu memberikan perhatian yang serius terhadap penanaman nilai-nilai ini, termasuk mengasah sensitivitas nurasi ketika terjadi pelanggaran terhadapnya.

Tanpanya, sains data, dan semua teknologi pendukungnya, termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), akan menjadi pedang bermata dua yang sisi jahatnya membahayakan manusia dan kemanusiaan di masa depan.

Menurut Fukuyama dan kolega (2021), dalam konteks bernegara, yang dikhawatirkan dari monopoli informasi oleh para perusahaan raksasa, bukan karena dia akan

mendistorsi pasar, tetapi karena membahayakan demokrasi.

Kedua, publik harus selalu diedukasi atau senantiasa sadar untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, terutama yang menyebar melalui media sosial. Dalam konteks ini, konsep *tabayyun* dalam ajaran Islam menjadi terlihat semakin relevan dan penting.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصْحِرُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." (QS Al-Hujurat 49:6).

Tanpanya proses *tabayyun*, informasi yang tidak benar akan dengan cepat menyebar seperti api yang menyambar jerami kering. Informasi tidak hanya berharga karena kecepatannya sampai, tetapi juga kredibilitas.

Kecepatan sebaran tersebut semakin cepat ketika terjadi di pusaran publik dengan imajinasi paranoid yang tinggi karena perasaan terancam, kesesuaian informasi dengan preconsepsi yang dimiliki, dan frekuensi informasi yang diterima (Greenhill & Oppenheim, 2017; Davies, 2018).

Pengguna media sosial, karenanya, harus menjadi pemikir mandiri dan tidak mudah terbawa arus narasi publik, terutama jika kredibilitas informasi yang beredar tidak bisa diverifikasi.

Hanya dengan kesadaran ini, kita akan dapat memanen manfaat media sosial sebagai penyubur demokrasi. Informasi yang menyebar melalui media sosial sudah tersaring, meski tidak mungkin sempurna, dan karenanya dapat diharapkan untuk menghadirkan pencerahan, tilikan, dan kesadaran baru.

Ketiga, atmosfir yang kondusif untuk kemunculan kejujuran kolektif dan budaya saling mengapresiasi perlu diupayakan dengan serius. Negara mempunyai peran penting di sini untuk menjaga iklim demokrasi yang tulen. Warga negara perlu diberi ruang untuk menyampaikan aspirasinya.

Hanya dengan demikian, diskursus dan partisipasi politik yang sehat akan membudaya. Warga negara tidak takut untuk bersuara karena negara memfasilitasinya dan para pendukung penguasa negara juga tidak menebarkan ketakutan. Warga negara menjadi terhormat dan posisinya pun menjadi kuat. Kondisi seperti ini dibutuhkan untuk pertumbuhan kebebasan (Acemoglu & Robinson, 2020). Media sosial dapat menjadi salah satu kanal kebebasan tersebut, terutama jika media tradisional tidak bersuara atau terkekang.

Menurut Acemoglu dan Robinson (2020), kebebasan hanya akan muncul dan berkembang jika negara dan masyarakat kuat. Keduanya diperlukan. Negara yang kuat diperlukan untuk mengendalikan kekerasan, menegakkan hukum, dan menyediakan layanan publik yang memberdayakan. Warga negara yang kuat dibutuhkan untuk mengontrol dan mengekang negara.

Jika ruang kebebasan berbicara dibuka atau bahkan dianjurkan, maka negara atau para pendukung penguasa negara tidak akan menjadi pengubur demokrasi. Penguasa

negara seperti ini tidak akan menjadi diktator pemutarbalik fakta (*spin dictator*), dengan semua potensi tindakannya. Karena berniat menjaga demokrasi yang tulen, mereka, antara lain, tidak mengambinghitamkan oposisi atas pelanggaran, tidak mengeksploitasi korupsi, tidak memalsukan demokrasi, tidak membangkrutkan oposisi, tidak memanipulasi citra kompetensi, dan tidak menyebarkan propoganda (*e.g.*, Guriev & Treisman, 2022).

Keempat, ketika informasi palsu dan kebohongan menyebar dan tidak terbandung, maka mengkonternya dengan narasi tandingan untuk meluruskan perlu dilakukan juga secara massal. Di sini, pengguna media sosial yang tercerahkan dan mempunyai kesadaran etis baik akan dampak buruk informasi palsu, dapat secara kolektif melakukan.

Pengguna ini tidak memihak salah satu pihak, jika ada yang beseberangan, tetapi memihak kepada nilai-nilai abadi dan kebenaran. Tentu, peran seperti ini bukan tanpa risiko, karena berpotensi menjadi musuh para pihak yang tidak terbuka terhadap keragaman perspektif. Banyak dari mereka, para penyebar informasi palsu dan kebohongan, belum dewasa secara politis.

Jika aksi pemihakan kepada nilai-nilai abadi dan kebenaran ini dilakukan secara kolektif, informasi yang benar akan semakin lantang. Memang, koreksi informasi seperti ini tidak selalu mengubah kepercayaan orang yang sebelumnya sudah terpapar informasi palsu atau kebohongan (Flynn *et al.*, 2017), namun optimisme harus terus dirawat dan dijadikan basis aksi kolektif.

6 Ucapan Terima Kasih

Semua pencapaian dalam hidup, termasuk jabatan akademik profesor, tak pernah bersifat personal. Dalam prosesnya, banyak sekali pihak yang mendukung dan melapangkan jalan, dan semuanya dengan perkenan Allah Yang Maha Melapangkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah menyetujui pengusulan jabatan akademik profesor. Juga kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta dan semua jajaran, yang telah membantu proses reviu dan pengusulan berkas.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) dan jajaran, Ketua Pengawas Yayasan Badan Wakaf UII dan jajaran, dan Ketua Umum Pengurusan Yayasan Badan Wakaf UII dan jajaran, atas dukungannya kepada pengembangan karier akademik.

Apresiasi tinggi juga saya sampaikan kepada pada kolega: wakil rektor, sekretaris eksekutif, kepala badan, direktur, dan dekan dan semua jajaran di lingkungan UII, atas dukungan dan kerja samanya selama ini. Dua hal ini sangat penting untuk membangun iklim organisasi yang sehat dan kondusif untuk kemajuan substantif institusi.

Izinkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para kolega di Fakultas Teknologi Industri, terkhusus kepada dekan dan wakil dekan. Juga kepada kolega di Jurusan

Teknik Informatika, yang sudah menjadi keluarga yang menemani dalam pengembaraan akademik.

Kepada semua dosen dan tenaga pendidikan UII, saya juga ucapkan terima kasih.

Pengembaraan akademik seseorang selalu dimulai dari tingkat bawah. Atas didikan dan ilmu yang diberikan, saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya di SDN III Teluk Wetan Jepara, Madrasah Diniyyah Al-Ishlah Teluk Wetan Jepara, MTs Negeri Kudus, Madrasah Diniyyah Mu'awanatul Muta'allimin Kenepan Kudus, dan Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin Jagalan Kudus.

Perantauan dalam mencari ilmu berlanjut. Saya pun mengucapkan syukur dan terima kasih kepada para guru di SMA Muhammadiyah I Yogyakarta, Jurusan Manajemen Universitas Gadjah Mada, Jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung, Department of Arts and Sciences Norwegia Hogskolen i Telemark (Norwegia), dan Departemen Sistem Informasi University of Agder (Norwegia). Izinkan, secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada guru dan mentor saya ketika menyusun disertasi, Prof. Maung K. Sein dan Bjorn Furuholt, Ph.D.

Saya juga berterima kasih kepada guru-guru saya di The Norwegian School of Economics (Norwegia), University of Oslo (Norwegia), Copenhagen Business School (Denmark), dan Malmö University (Swedia), ketika saya mengambil beberapa mata kuliah selama menyelesaikan program doktoral.

Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga mengucapkan orang tua saya, Almarhum Bapak H. Slamet Sholih dan Ibu Hj. Suyati Sholihah, kedua mertua saya, Bapak H.

Sudarto dan Ibu Hj. Titik Sugiarti yang telah membimbing setiap ikhtiar, mendukung setiap keinginan, dan mengirimkan doa tak henti. Juga kepada semua adik dan keluarganya: Kholifah, Miftahin, Syafiul Muzid, Fajar Nugroho, dan Rakhma Atrikarini.

Kepada istri tercinta, Nurul Indarti, saya mengucapkan terima atas semua dukungan dalam suka dan duka, serta doa terbaiknya selama ini. Saya juga mendoakan proses pengukuhan profesornya, yang saat ini sedang menyusun pidato, dilancarkan oleh Allah.

Kedua putri saya merupakan sumber energi kehidupan yang tiada habisnya. Saya sampaikan terima kasih dan rasa sayang kepada Aqila Salma Kamila dan Ahsana Zaima Mahira. Keluarga merupakan sistem pendukung yang berharga tak terkira.

Semoga jabatan akademik profesor ini, bermanfaat, tidak hanya bagi saya, tetapi terlebih kepada banyak orang: para murid, institusi, agama, bangsa, dan negara. Semoga jabatan ini juga menjadi wasilah ilmu yang bermanfaat bagi guru-guru saya dan saya.

Terima kasih juga sampaikan kepada semua undangan dan hadirin yang sudah meluangkan waktu menghadiri acara pengukuhan, terkhusus kepada para guru, sahabat, dan kolega pemimpin perguruan tinggi sahabat.

Semoga Allah selalu meridai kita semuanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

7 Referensi

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2020). *The narrow corridor: States, societies, and the fate of liberty*. London: Penguin.
- Baskerville, R. L., & Myers, M. D. (2002). Information systems as a reference discipline. *MIS Quarterly*, 26 (1), 1-14.
- BBC (2019). Facebook agrees to pay Cambridge Analytica fine to UK. *BBC News*, 30 Oktober. Tersedia daring: <https://www.bbc.com/news/technology-50234141>
- Bradshaw, S. & Howard, P. N. (2019) The global disinformation disorder: 2019 global inventory of organised social media manipulation. *Working Paper 2019.2*. Oxford, UK: Project on Computational Propaganda.
- Bradshaw, S., Bailey, H. & Howard, P. N. (2021) Industrialized disinformation: 2020 global inventory of organised social media manipulation. *Working Paper 2021.1*. Oxford, UK: Project on Computational Propaganda.
- Chertoff, M. & Rasmussen, A. F. (2019). The unhackable election: What it takes to defend democracy. *Foreign Affairs*, Januari/Februari. Tersedia daring: <https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-12-11/unhackable-election>
- DataReportal (2022a). *Global social media stats*. Tersedia daring: <https://datareportal.com/social-media-users>.
- DataReportal (2022b). *Digital 2022: Indonesia*. Tersedia daring: <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>.
- Davies, W. (2018). *Nervous states: Democracy and the decline of reason*. New York: WW Norton & Company.
- Dini, A. A., & Wahid, F. (2017). Four strategies of social media use among Indonesian politicians. Dalam Choudrie, J., Islam, M., Wahid, F., Bass, J., Priyatma, J. (ed.) *Information and Communication Technologies for Development (ICT4D) 2017*. IFIP Advances in Information and Communication Technology 504, 681-692, Cham: Springer.
- Dini, A. A., Sæbo, Ø., & Wahid, F. (2018). Affordances and effects of introducing social media within eParticipation—Findings from government-initiated Indonesian project. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 84(4), 1-14.
- Elemia, C. (2022). In the Philippines, a flourishing ecosystem for political lies. *The New York Times*, 6 Mei. Tersedia daring: <https://www.nytimes.com/2022/05/06/business/philippines-election-disinformation.html>

- Flynn, D. J., Nyhan, B., & Reifler, J. (2017). The nature and origins of misperceptions: Understanding false and unsupported beliefs about politics. *Political Psychology*, 38, 127-150.
- Fukuyama, F., Richman, B., & Goel, A. (2021). How to save democracy from technology: Ending big tech's information monopoly. *Foreign Affairs*, Januari/Februari. Tersedia daring: <https://www.foreignaffairs.com/articles/ united-states/2020-11-24/fukuyama-how-save-democracy-technology>
- Gagnon, J. P. (2018). 2,234 descriptions of democracy: An update to democracy's ontological pluralism. *Democratic Theory*, 5(1), 92-113.
- Gagnon, J. P., & Fleuss, D. (2020). The case for extending measures of democracy in the world "Beneath", "Above", and "Outside" the national level. *Political Geography*, 83, 102276.
- Giglio, M. (2011). How Wael Ghonim sparked Egypt's uprising. *Newsweek*, 13 Februari. Tersedia daring: <https://www.newsweek.com/how-wael-ghonim-sparked-egypts-uprising-68727>
- Greenhill, K. M., & Oppenheim, B. (2017). Rumor has it: The adoption of unverified information in conflict zones. *International Studies Quarterly*, 61(3), 660-676.
- Guriev, S., & Treisman, D. (2022). *Spin dictators: The changing face of tyranny in the 21st century*. Princeton: Princeton University Press.
- Heawood, J. (2018). Pseudo-public political speech: Democratic implications of the Cambridge Analytica scandal. *Information Polity*, 23(4), 429-434.
- Howard, P. N., & Woolley, S. C. (2016). Political communication, computational propaganda, and autonomous agents: Introduction. *International Journal of Communication*, 10, 1-9.
- Jaffer, J. (2021). Liars in high places. *Foreign Affairs*. November/Desember. Tersedia daring: <https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/2021-10-19/liars-high-places>
- Jha, C. K., & Kodila-Tedika, O. (2020). Does social media promote democracy? Some empirical evidence. *Journal of Policy Modeling*, 42(2), 271-290.
- Julaika, H. (2020). Pemerintah habiskan Rp90,45 miliar untuk bayar buzzer. *Media Indonesia*, 20 Agustus. Tersedia daring: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/338091/pemerintah-habiskan-rp9045-miliar-untuk-bayar-buzzer>
- Khondker, H. H. (2011). Role of the new media in the Arab Spring. *Globalizations*, 8(5), 675-679.
- Kietzmann, J. H., Silvestre, B. S., McCarthy, I. P., & Pitt, L. F. (2012). Unpacking the social media phenomenon: towards a research agenda. *Journal of Public Affairs*, 12(2), 109-119.

- Lazer, D., Baum, M., Grinberg, N., Friedland, L., Joseph, K., Hobbs, W., & Mattsson, C. (2017). *Combating fake news: An agenda for research and action*. Tersedia daring: <https://www.sipotra.it/old/wp-content/uploads/2017/06/Combating-Fake-News.pdf>
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. New York: Crown.
- Lim, M. (2012). Clicks, cabs, and coffee houses: Social media and oppositional movements in Egypt, 2004–2011. *Journal of Communication*, 62(2), 231-248.
- Lim, M. (2015). Many clicks but little sticks: Social media activism in Indonesia. Dalam Shah, N., Sneha, P. P., & Chattapadhyay, S. (ed.). *Digital Activism in Asia Reader* (hal. 127-154). Lüneburg: Meson Press.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427.
- Luoma-aho, V., & Canel, M. J. (Ed.). (2020). *The handbook of public sector communication*. John Wiley & Sons.
- Macapagal, M. E. J., & Nario-Galace, J. (2003). Social psychology of People Power II in the Philippines. *Peace and Conflict*, 9(3), 219-233.
- Robey, D., & Boudreau, M.-C. (1999). Accounting for the contradictory organizational consequences of information technology: Theoretical directions and methodological implications. *Information Systems Research*, 10(2), 167–185.
- Sæbø, Ø., Rose, J., & Flak, L. S. (2008). The shape of eParticipation: Characterizing an emerging research area. *Government Information Quarterly*, 25(3), 400-428.
- Saraswati, M. S. (2016). The political campaign industry and the emergence of social media in post-authoritarian Indonesian electoral politics. *Disertasi doktor*. Murdoch University.
- Sastramidjaja, Y. (2021). Beating the buzzers. *Inside Indonesia*, Oktober. Tersedia daring: <https://www.insideindonesia.org/beating-the-buzzers>
- Sastramidjaja, Y., Berenschot, W., Wijayanto, & Fahmi, I. (2021). The threat of cyber troops. *Inside Indonesia*, 146.
- Sastramidjaja, Y., & Wijayanto (2022). *Cyber troops, online manipulation of public opinion and co-optation of Indonesia's cybersphere*. Singapura: ISEAS – Yusof Ishak Institute.
- Scholl, H. J. (2007). Central research questions in e-government, or which trajectory should the study domain take?. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 1(1), 67-88.
- Sein, M. K., Henfridsson, O., Purao, S., Rossi, M., & Lindgren, R. (2011). Action design research. *MIS Quarterly*, 35(1), 37-56.

- Shapiro, C., Varian, H. R., & Carl, S. (1998). *Information rules: A strategic guide to the network economy*. Boston: Harvard Business Press.
- Shirky, C. (2011). The political power of social media: Technology, the public sphere, and political change. *Foreign Affairs*, 28-41.
- Soh, C., Kien Sia, S., Fong Boh, W., & Tang, M. (2003). Misalignments in ERP implementation: A dialectic perspective. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 16(1), 81-100.
- Sunstein, C. R. (2021). *Liars: Falsehoods and free speech in an age of deception*. Oxford: Oxford University Press.
- Taleb, N. (2005). *The black swan: Why don't we learn that we don't learn*. New York: Random House.
- The Data Team (2016). Celebrities' endorsement earnings on social media. *The Economist*, 17 Oktober. Tersedia daring: <https://www.economist.com/graphic-detail/2016/10/17/celebrities-endorsement-earnings-on-social-media>
- The Guardian (2007). Estrada given life sentence for corruption. *The Guardian*. 12 September. Tersedia daring: <https://www.theguardian.com/world/2007/sep/12/philippines>
- Tucker, J. A., Theocharis, Y., Roberts, M. E., & Barberá, P. (2017). From liberation to turmoil: Social media and democracy. *Journal of Democracy*, 28(4), 46-59.
- Wahid, F., & Sæbø, Ø. (2015). Affordances and effects of promoting eParticipation through social media. Dalam Tambouris, E., Panagiotopoulos, P., Sæbø, Ø., Tarabanis, K., Wimmer, M. A., Milano, M. Pardo, T. *Electronic Participation: ePart 2015*. Lecture Notes in Computer Science, 9249 (h. 3-14). Cham: Springer.
- Warren, M. (2017). A problem-based approach to democratic theory. *American Political Science Review*, 111(1), 39–53.
- Westfall, S. (2022). Philippine election: How did Marcos win the presidency? *The Washington Post*, Mei 11. Tersedia daring: <https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/11/why-ferdinand-marcos-bongbong-win-philippine-election/>
- Wong, J. C (2019). Facebook to be fined \$5bn for Cambridge Analytica privacy violations – reports. *The Guardian*, 12 Juli. Tersedia daring: <https://www.theguardian.com/technology/2019/jul/12/facebook-fine-ftc-privacy-violations>
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. London: Profile Books.

Fathul Wahid

Data pribadi

Tempat, tanggal lahir: Jepara, 26 Januari 1974
Jabatan akademik: Profesor (Sistem Informasi)
Lembaga: Jurusan Informatika
Universitas Islam Indonesia
NIDN: 0526017401
Scopus ID: 8840512500
ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3124-6866
Google Scholar profile: goo.gl/cDKAdX
Blog: uii.ac.id/pojok-rektor
fathulwahid.wordpress.com
menjadidosen.wordpress.com
publikasiinternasional.wordpress.com

Keluarga

Istri: Prof. Nurul Indarti, S.E., Sivilokonom, Cand.Merc., Ph.D.
Anak: Aqila Salma Kamila, S.P.W.K.
Ahsana Zaima Mahira

Riwayat jabatan akademik

1998 Bergabung dengan Universitas Islam Indonesia
2000 Asisten Ahli
2007 Lektor
2010 Lektor Kepala
2019 Profesor

Riwayat pendidikan

1. Department of Information Systems, University of Agder, Kristiansand, Norwegia (Ph.D., 2010-2013)
2. Department of Information Systems, University of Agder, Kristiansand, Norwegia (M.Sc., 2001-2003)
3. Department of Arts and Sciences (Norwegian Language and Civilization for Foreign Students), Telemark University College, Norwegia (2000-2001)
4. Jurusan Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung (S.T., 1993-1997)
5. Jurusan Manajemen, Universitas Gadjah Mada (1992-1993)
6. SMA Muhammadiyah I, Yogyakarta (1989-1992)
7. Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin, Jagalan, Kudus (1986-1989)

8. Madrasah Diniyyah Mu'awanatul Muslimin, Kenepan, Kudus (1986-1989)
9. Madrasah Tsanawiyah Negeri Kudus (1986-1989)
10. Madrasah Diniyyah Al-Ishlah, Teluk Wetan, Welahan, Jepara (1982-1986)
11. SD Negeri Teluk Wetan III, Welahan, Jepara (1981-1986)

Riwayat amanah

1. Profesor (Sistem Informasi), Universitas Islam Indonesia (Desember 2019- sekarang)
2. Wakil Ketua Bidang Dosen dan Tendik, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Pusat (2021-2025)
3. Ketua, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta (2019-2023)
4. Sekretaris Umum, Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia (BKSPTIS) (2019-2023)
5. Rektor, Universitas Islam Indonesia (Juni 2018- sekarang)
6. Kepala Badan Sistem Informasi, Universitas Islam Indonesia (Mei 2016- Mei 2018)
7. Kepala Badan Pengembangan Akademik, Universitas Islam Indonesia (2014-April 2016)
8. Dekan Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia (2006-2010)
9. Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia (2005-2006)
10. Kepala Laboratorium Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak, Jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia (2004-2005)
11. Kepala Pusat Studi Kebijakan dan Pengembangan Teknologi, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia (1999-2000)
12. Sekretaris Pusat Studi Kebijakan dan Pengembangan Teknologi, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia (1998-1999)

Publikasi ilmiah (terpilih)

Artikel di jurnal/prosiding

1. Alfandya, A., & Wahid, F. (2021). Memahami perjalanan"Kampung Cyber" melalui lensa Actor Network Theory. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(6), 1149-1158.
2. Nuswantoro, S. A., Wahid, F., & Putro, H. P. (2020). Risiko pengembangan perangkat lunak di indonesia: Temuan Studi Delphi. *Teknologi: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 10(1), 43-54.

3. Wahid, F. (2020). Mendesain Transformasi Pendidikan yang Kokoh dan Lentur. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, Universitas Majalengka, September.
4. Alfandya, A., & Wahid, F. (2020). Peran modal sosial dalam keberhasilan inisiatif teknologi informasi dan komunikasi untuk pembangunan. *JIPi (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 5(1), 56-66.
5. Wahid, F., Dirgahayu, R. T., Hamzah, A., & Setiaji, H. (2019). Surviving the Disconnections: The Use of Information Systems in Indonesian Public Health Facilities. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 482(1).
6. Dini, A. A., Sæbo, Ø., & Wahid, F. (2018). Affordances and effects of introducing social media within eParticipation—Findings from government-initiated Indonesian project. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*. 84(4).
7. El-Gazzar, R. F., Wahid, F., & Stendal, K. (2018). Unpacking Knowledge on Cloud Computing: An Umbrella Review. *Proceedings of the 2018 Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2018)*. New Orleans, 16-18 Agustus.
8. Wahid, F., Dirgahayu, R. T., Hamzah, A., & Setiaji, H. (2018). Surviving the disconnections: The use of information systems. *Proceedings of the International Conference on Information Technology and Digital Applications (ICITDA) 2018*, Manila, 8 November.
9. Wahid, F., Dirgahayu, R. T., Hamzah, A., & Setiaji, H. (2017). When more is less: The case of disconnected information systems in Indonesian public health facilities. *Proceedings of the International Conference on Information Technology and Digital Applications (ICITDA) 2017*, Yogyakarta, 8 November.
10. Wahid, F. (2017). Social Media in The Public Sector: Current Practices and Ways Forward. Dalam N. I. Jaafar & A. Sulaiman (Eds.). *The Influences of Social Networks in Modern Society*. Malaysia: University of Malaya.
11. El-Gazzar, R. F., Henriksen, H. Z., & Wahid, F. (2017). IT Innovations and Entrepreneurship in Emerging Economies - Is Cloud Computing a Magic Ingredient for Egyptian Entrepreneurs? *Proceedings of The 25th European Conference on Information Systems (ECIS)*, Guimarães, Portugal, 5-10 Juni.
12. Wahid, F., Sæbø, Ø., & Furuholt, B. (2017). Tensions in Information System Artefacts: Explaining Land Information Systems' Sub-Optimal Impact in Indonesia. *Proceedings of the 14th International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries*. Berlin Heidelberg: Springer.
13. Dini, A. A., & Wahid, F. (2017). Four Strategies of Social Media Use

- among Indonesian Politicians. *Proceedings of the 14th International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries*. Berlin Heidelberg: Springer.
14. Hamzah, A., & Wahid, F. (2016). Participatory Design in the Development of Healthcare Systems: A Literature Review. *Proceedings of the 2nd International Conference on Communication and Information Processing (ICCIP 2016)*, Singapore, 26-29 November.
 15. Wahid, F. (2016). Power Exercise in the Institutionalization of an eProcurement System in Indonesian Local Government. *Proceedings of the International Conference on Information Technology and Digital Applications (ICITDA) 2016*, Yogyakarta, 14-16 November.
 16. Dini, A. A., Wahid, F., & Sæbø, Ø. (2016). Affordances and Constraints of Social Media Use in eParticipation: Perspectives from Indonesian Politicians. *Proceedings of The 20th Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS 2016)*, Chiayi, Taiwan, 27 Juni-1 Juli.
 17. Nur Kholis, N., Maharika, I.F., & Wahid, F. (2015). Recasting the Disciplines under the Framework of Islam: Lessons from the Textbook Writing Initiative at Universitas Islam Indonesia. *Proceedings of the International Conference in the Integration of Contemporary and Islamic Knowledge in Islamic Universities*, Gontor, Indonesia, 12-14 Desember.
 18. Wahid, F., & Sæbø, Ø. (2015). Affordances and Effects of Promoting eParticipation Through Social Media. Dalam E. Tambouris, H. J. Scholl, M. Janssen, M. A. Wimmer, K. Tarabanis (Eds.). *Electronic Government*. Berlin Heidelberg: Springer.
 19. El-Gazzar, R. F., & Wahid, F. (2015). Strategies for Cloud Computing Adoption: Insights from the Norwegian Public Sector. *Proceedings of the European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems 2015 (EMCIS2015)*, Athens, Greece, 1-2 Juni.
 20. Wahid, F., Sæbø, Ø., & Furuholt, B. (2015). Does a Land Information System Resolve Land Conflicts? A Tale from Rural Eastern Indonesia. *Proceedings of the ICTD 2015 Conference*, Singapore, 15-18 Mei.
 21. Hamzah, A., & Wahid, F. (2015). Reexamining usability dimensions: The case of social media. *Proceedings of the 3rd International Conference of Information and Communication Technology*, Bali, 27-29 Mei.
 22. Wahid, F. (2015). Power Play in the Institutionalization of an eProcurement System: A Tale from Indonesian Local Government. *Proceedings of the 3rd International Conference of Information and Communication Technology*, Bali, 27-29 Mei.

23. Wahid, F., Sæbø, Ø., & Furuholt, B. (2015). The Use of Information Systems in Indonesia's Land Management. *Proceedings of the 13th International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries*, Negombo, Sri Lanka, 20-23 Mei.
24. Furuholt, B., Wahid, F., & Sæbø, Ø. (2015). Land Information Systems: A Neglected Area in the ICT4D Research?. *Proceedings of the 48th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 2015* (hal. 2158-2167), Kauai, Hawaii, 5-8 Januari.
25. Wahid, F., & Sæbø, Ø. (2014). Understanding eParticipation Services in Indonesian Local Government. Dalam Linawati, M. S. Mahendra, E. J. Neuhold, A. M. Tjoa, & I. You, I. (Eds.), *Information & Communication Technology*, Berlin Heidelberg: Springer, 328-337.
26. Setyono, P., Wahid, F., & Meidawati, N. (2014). Unintended Benefits of Adopting an ERP System in an Indonesian University. Dalam N. Panchaud & E. Marclay (Eds.), *SAP for Universities*. Lausanne, Switzerland: EPFL Press.
27. Wahid, F., & Sein, M. K. (2014). Steering Institutionalization through Institutional Work: The Case of an eProcurement System in Indonesian Local Government. *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 2014*, Hawaii, 6-9 Januari.
28. Wahid, F. (2013). The Antecedents and Impacts of a Green eProcurement Infrastructure: Evidence from the Indonesian Public Sector. *International Journal of Internet Protocol Technology*, 7(4), 210-218.
29. Wahid, F., & Indarti, N. (2013). Facebook, Online Social Network, and the Rise of Nascent Entrepreneurs. Dalam Gaol, F. L., Kadry, K., Taylor, M., & Li, P. S. (Eds.). *Recent Trends in Social and Behaviour Sciences*. Leiden, The Netherlands: CRC Press.
30. Wahid, F., Ramdhani, N., & Wiradhany, W. (2013). More Gaining and Less Gaming? The Internet Use in Indonesia After One Decade. Dalam Gaol, F. L., Kadry, K., Taylor, M., & Li, P. S. (Eds.). *Recent Trends in Social and Behaviour Sciences*. Leiden, The Netherlands: CRC Press.
31. El-Gazzar, R., & Wahid, F. (2013). An Analytical Framework to Understand the Adoption of Cloud Computing: An Institutional Theory Perspective. *Proceedings of the International Conference on Cloud Security Management (ICCSM) 2013*, Seattle, USA, 17-18 Oktober.
32. Wahid, F., & Prastyo, D. (2013). Politicians' Trust in the Information Technology Use in General Election: Evidence from Indonesia. *Procedia Technology*, 11, 374-379.
33. Merschbrock, C., & Wahid, F. (2013). Actors' Freedom of Enactment in a Loosely Coupled System: The Case of BIM Use in Construction

- Projects. *Proceedings of the European Conference on Information Systems (ECIS) 2013*, Utrecht, The Netherlands, 6-8 Juni.
34. Wahid, F. (2013). A Triple-Helix Model of Sustainable Government Information Infrastructure: Case Study of the eProcurement System in the Indonesian Public Sector. Dalam H. Linger, J. Fisher, A. Barnden, C. Barry, M. Lang, C. Schneider (Eds.) *Building Sustainable Information Systems*, Berlin Heidelberg: Springer.
 35. Wahid, F. (2013). Translating the Idea of the eGovernment One-Stop Shop in Indonesia. Dalam Khabib, M., Neuhold, E. J., Tjoa, A M., Weippl, E., and You, I (Eds). *Information & Communication Technology*. Berlin Heidelberg: Springer, 1-10.
 36. Wahid, F., & Sein, M. K. (2013). Institutional Entrepreneurs: The Driving Force in Institutionalization of Public Systems in Developing Countries. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 7(1), 76-92.
 37. Wahid, F. (2013). Themes of Research on eGovernment in Developing Countries: Current Map and Future Roadmap. *Proceedings of the 46th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 2013*, Hawaii, 7-10 Januari.
 38. Wahid, F., & Furuholt, B. (2012). Understanding the Use of Mobile Phones in the Agricultural Sector in Rural Indonesia: Using the Capability Approach as Lens. *International Journal of Information and Communication Technology*, 4(2/3/4), 165-178.
 39. Indarti, N., & Wahid, F. (2012). University-Industry Joint-Research: How does the Indonesian Industry Perceive It?. *The Triple Helix 10th International Conference 2012*, Bandung, Indonesia, 8-10 Agustus.
 40. Wahid, F. (2012). The Green eProcurement Infrastructure in the Indonesian Public Sector: Its Antecedents and Impact on the Triple Bottom Line. *Proceedings of the 2012 International Conference in Green and Ubiquitous Technology*, Bandung, Indonesia, 7-8 Juli.
 41. Wahid, F. (2012). Institutionalization of Public Systems in Developing Countries: A Case Study of eProcurement in Indonesian Local Government. *Proceedings of the Transforming Government Workshop 2012*, Brunel University, West London, UK, 8-9 Mei.
 42. Wahid, F. (2012). The Current State of Research on eGovernment in Developing Countries: A Literature Review. Dalam H. J. Scholl, M. Janssen, M. A. Wimmer, C. E. Moe, L. S. Flak (Eds.). *Electronic Government*. Berlin Heidelberg: Springer, 1-12.
 43. Wahid, F., (2011). Is There a Bidirectional Relationship between e-Government and Anti-Corruption Practices?: Analysis of Cross-Country Data. *Proceedings of the International Conference on Informatics for Development 2011*, Yogyakarta, Indonesia, 26 November.

44. Wahid, F., Sein, M. K., & Furuholt, B. (2011). Unlikely Actors: Religious Organizations as Intermediaries in Indonesia. *Proceedings of the 11th International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries*, Kathmandu, Nepal, 22-25 Mei.
45. Wahid, F. (2011). Explaining History of e-Government Implementation in Developing Countries: An Analytical Framework. Dalam M. Janssen et al. (Eds.). *Electronic Government*. Berlin Heidelberg: Springer, 38–49.
46. Wahid, F. (2011). Explaining Failure of E-Government Implementation in Developing Countries: A Phenomenological Perspective. *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2011*, Yogyakarta, 17-18 Juni.
47. Wahid, F., & Setyono, P. (2010). Dealing with the Misfits in an ERP Implementation: Experiences from a University Context in Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2010*, Yogyakarta, 19 Juni.
48. Wahid, F. (2010). Examining Adoption of e-Procurement in Public Sector using the Perceived Characteristics of Innovating: Indonesian Perspective. Dalam A. B. Sideridis & Ch. Z. Patrikakis (Eds.). *e-Democracy*, Berlin Heidelberg: Springer, 64–75.
49. Kristiansen, S., Wahid, F., & Furuholt, B. (2008). Gaming or gaining? Internet café use in Indonesia and Tanzania. *The International Information & Library Review*, 40(2), 129–139.
50. Furuholt, B., & Wahid, F. (2008). E-government Challenges and the Role of Political Leadership in Indonesia: the Case of Sragen. *Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 2008*, Hawaii, 7- 10 Januari.
51. Wahid, F. (2007). Using the Technology Adoption Model to Analyze Internet Adoption and Use among Men and Women in Indonesia. *The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries*, 32, 1-8.
52. Kristiansen, S., Wahid, F., & Furuholt, B. (2006). Investing in Knowledge? Information Asymmetry and Indonesian Schooling. *International Information & Library Review*, 38(2), 192–204.
53. Wahid, F., Furuholt, B., & Kristiansen, S. (2006). Internet for Development? Patterns of Use Among Internet Cafe Customers in Indonesia. *Information Development*, 22(4), 278-291.
54. Kristiansen, S., Kimeme, J., Mbwambo, A., & Wahid, F. (2005). Information Flows and Adaptation in Tanzanian Cottage Industries. *Entrepreneurship and Regional Development*, 17, 365-388.
55. Furuholt, B., Kristiansen, S., & Wahid, F. (2005). The Spread of Information in a Developing Society: A Study of Internet Cafe Users in Indonesia. *The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries*, 22, 1-16.

56. Kristiansen, S., Furuholt, B., & Wahid, F. (2003). Internet Cafe Entrepreneurs: Pioneers in Information Dissemination in Indonesia. *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, 4(4), 251-263.

Buku

1. Wahid, F. (akan terbit). *Kecil-Kecil Cabai Rawit: Cerita Ringan dari Kelas*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
2. Wahid, F. (Ed.) (akan terbit). *Membangun Budaya Digital: Pelajaran dari Lapangan*. Yogyakarta: UII Press.
3. Wahid, F. (2022). *Merawat Misi Universitas*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
4. Wahid, F. (2021). *Manajemen Universitas di Tengah Turbulensi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
5. Wahid, F. (2020). *Sayap-Sayap Kemajuan Universitas*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
6. Wahid, F. (2020). *Mendesain Universitas Masa Depan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
7. Wahid, F. (2020). *Melakukan Publikasi Internasional*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
8. Wahid, F. (2019). *Tentang Menjadi Dosen*. Jakarta: nulisbuku.com.
9. Wahid, F., & Dirgahayu, T. (Editor) (2012). *Pembelajaran Teknologi Informasi di Perguruan Tinggi: Perspektif dan Pengalaman*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
10. Wahid, F. (2010). *Servant Leadership: Refleksi Kepala Pelayan Kampus*. Yogyakarta: Navila Idea.
11. Kusumadewi, S., Fauziah, A., Khoiruddin, A. A., Wahid, F., Setiawan, M. A., Rahayu, N. W., Hidayat, T., & Prayudi, Y. (2009). *Informatika Kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
12. Wahid, F. (2007). *Teknologi Informasi dan Pendidikan*. Yogyakarta: Ardana Media.
13. Wahid, F. (2004). *E-Dakwah: Dakwah Melalui Internet*. Yogyakarta: Gava Media.
14. Wahid, F. (2004). *Dasar-dasar Algoritma dan Pemrograman*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
15. Wahid, F. (2003) *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Penerbit Andi.



i'm UIN

Islami
Mondial
Unggul
Intelektual
Indonesiawi